



Gerakan Politik Agraria oleh Petani di Indonesia (Studi pada Serikat Petani Indonesia)

Randa Putra Kasea Sinaga^{1*}, Fajar Utama Ritonga², Andry Anshari³

¹²³Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Submitted : 08 October 2022 Revision : 18 Januari 2022 Accepted : 20 January 2023

Abstract

Based on the transformation of the agrarian struggle into a political movement carried out by Serikat Petani Indonesia (SPI) as a mass peasant organization over the problem of inequality in agrarian control in Indonesia, this paper describes and analyzes how the pattern of agrarian political movements is carried out. By using data collection techniques such as literature studies and in-depth interviews at the SPI management level (from the base level in the village sector; the regional level in the provincial sector, as well as the central level in charge of the national and international sectors). By using the Narrative Research Analysis approach, the authors classify the patterns of political movements carried out by SPI, classified into local, national and international levels, each level having links as a pattern that is deemed necessary to synergize with each levels. SPI has taken actions from a social, economic, cultural, and political standpoint that are manifestations of views based on problems faced by peasants themselves. Based on the findings of this study, the authors believe that agrarian issues necessitate a massive multi-dimensional political movement that is justly oriented toward the interests of the people.

Keywords: *Agrarian Reform, Peasants, Political Movement*

Abstrak

Berdasarkan transformasi perjuangan agraria dalam gerakan politik yang dilakukan Serikat Petani Indonesia (SPI) sebagai organisasi massa petani atas permasalahan ketimpangan penguasaan agraria di Indonesia, tulisan ini menguraikan dan menganalisis bagaimana pola gerakan politik agraria yang dijalankan. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan *in-depth interview* pada tingkatan kepengurusan SPI (dari tingkat basis di sektor desa; tingkat wilayah di sektor provinsi, serta tingkatan pusat yang mengurus sektor nasional dan internasional), dengan menggunakan pendekatan *Narrative Research Analysis*, penulis menggolongkan pola gerakan politik yang dijalankan oleh SPI diklasifikasikan dalam tingkatan lokal, nasional, dan internasional, yang masing-masing tingkatan memiliki keterkaitan sebagai suatu pola yang dianggap perlu untuk saling bersinergi. SPI telah menjalankan aksi-aksi, baik dari segi sosial, ekonomi, budaya dan politik yang menjadi manifestasi dari pandangan yang didasarkan permasalahan yang dihadapi oleh petani itu sendiri. Berdasarkan hasil temuan penelitian ini, penulis melihat bahwa permasalahan agraria membutuhkan gerakan politik yang massif secara multi-dimensi serta berorientasi pada kepentingan rakyat dalam prinsip keadilan.

Kata Kunci: Gerakan Politik, Petani, Reforma Agraria

How to Cite: Sinaga, Randa P. K., Ritonga, F. U., & Anshari, A. (2023). Gerakan Politik Agraria oleh Petani di Indonesia (Studi pada Serikat Petani Indonesia), *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 15 (1): 93 – 109

*Corresponding author: Randa Putra Kasea Sinaga

E-mail: randasinaga@usu.ac.id

PENDAHULUAN

Pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah dan keterlibatan masyarakat sipil dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan merupakan pilar kembar reformasi pemerintahan neoliberal di Indonesia pasca-otoriter (Orde Baru). Namun, reformasi ini gagal membawa akuntabilitas ke bawah dan partisipasi rakyat untuk memberi manfaat bagi masyarakat miskin (Ito, 2011). Tidak terkecuali permasalahan agraria di Indonesia. Permasalahan agraria di Indonesia (dari waktu ke waktu) telah menciptakan berbagai konflik agraria, serta mendorong lahirnya perlawanan-perlawanan dalam gerakan rakyat, baik didasarkan pada penolakan atas ketidaksetaraan penguasaan lahan maupun sebagai reaksi dari pengambilalihan (perampasan) lahan sepihak. Hal ini tidak terlepas dari sejarah kebijakan yang berorientasi pada pembangunan kapitalistik. Fauzi (1999) menggambarkan bagaimana strategi politik otoritarian dan strategi pembangunan kapitalistik pada 'Orde Baru' di Indonesia telah melahirkan

konflik agraria dan berbagai embrionya. Oleh karena itu, maka adanya konflik agraria antara masyarakat tani dengan pihak penekan, selain memarginalkan kaum tani sebagai suatu kelas yang lebih lemah dalam hal akses kekuasaan, juga turut mendorong lahirnya upaya-upaya gerakan perlawanan oleh kaum tani.

Adanya bentuk-bentuk perlawanan dan perjuangan masyarakat tani yang dilandasi oleh kondisi konflik agraria dan kemiskinan petani telah melahirkan aksi-aksi masyarakat tani sebagai gerakan sosial atau hanya sebatas bentuk reaksioner dari tekanan yang dihadapi petani. Namun dari berbagai gerakan tersebut, seringnya lebih berfokus hanya dalam tingkatan lokal dan memposisikan kekuasaan sebagai pihak lawan. Masalahnya dari hal ini adalah gerakan sosial dalam perlawanan agraria akan tetap membutuhkan kecermatan dalam melihat dinamika politik yang akan membawa arus relasi kuasa yang terkait dengan penguasaan tanah. Sebagaimana dijelaskan oleh Hall et al. (2015), bahwa sangat dibutuhkan

model perlawanan politik dalam menanggapi perampasan tanah oleh para aktivis dan massa petani.

Gaventa (2019) menjelaskan bahwa dalam memahami dinamika perlawanan atas ketidaksetaraan penguasaan agraria, perlu melihat konstruksi historis dari relasi kuasa yang terkait dengan penguasaan tanah oleh korporasi dan eksploitasi sumber daya mineral, dengan seiring waktu, kekuasaan telah berfungsi untuk membawa isu-isu dan suara-suara tertentu ke dalam arena politik, sedangkan di saat bersamaan telah terjadi pengecualian dan penekanan yang lain (bahkan dapat berbentuk ekstrem). Dari pemahaman tersebut, dipahami bagaimana bentuk-bentuk kekuasaan yang *visible, hidden, and invisible* dimainkan dengan bervariasi menurut ruang (*closed, invited, and claimed*) dan tingkatan aksi (dari lokal hingga global) secara terus-menerus (berinteraksi), akan menjadi penentu dalam membuka dan menutup kemungkinan untuk bertindak atau tidak bertindak (perlawanan).

Maka dalam membangun gerakan agraria membutuhkan

kecermatan dalam melihat dinamika politik yang berlangsung. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Borras (2016), bahwa "*the changing context of land politics has far-reaching implications on how agrarian movements have emerged, how their political character has evolved, and subsequent forms and levels of movement building and collective actions*". Oleh karena itu, sangat penting untuk mencermati bagaimana gerakan agraria dibangun dan dijalankan dalam karakter politik yang juga berkembang dalam berbagai bentuk.

Merujuk pada hasil penelitian tentang gerakan politik agraria, Calleros-Rodríguez (2014) yang menganalisis bagaimana sengketa tanah adat telah terjadi dalam proses politik dan tanggapan politik terhadap sengketa kepemilikan tanah pada Komunitas Lacandona di Chiapas, Meksiko, menemukan bahwa Komunitas Lacandona memiliki hubungan *micro-corporatist* dengan negara dan bahwa penciptaannya telah membawa penerima manfaat (*comuneros*) ke dalam dinamika konflik dan kerja sama yang

berkelanjutan dengan negara, sesama komunitas pemilik tanah, NGO/CSO, dan gerilyawan. Adapun dari hasil penelitian ini telah menunjukkan bagaimana konflik telah ditangani dalam proses politik dan berkontribusi pada pemahaman teoretis tentang kategori proses politik dan *micro-corporatism* yang digunakan dalam kasus-kasus di mana masyarakat adat terlibat dalam konflik pertanahan.

Selain itu, terdapat juga penelitian oleh Martiniello (2015) tentang aksi sosial yang dilakukan oleh para petani perempuan di Distrik Amuru, Uganda. Penelitian ini menggambarkan bagaimana petani miskin skala kecil yang menolak perampasan dan menentang kekerasan negara telah menegaskan kembali arti-penting politik dari perjuangan sosial pedesaan dan menyoroti pentingnya masalah tanah dan agraria. Dari hasil penelitian ini, dipahami bahwa meningkatnya protes sosial pedesaan terwujud dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari praktik-praktik perlawanan tersembunyi maupun pada momen-momen kontestasi militan yang terbuka, dimana hal ini ditujukan

untuk membangun (kembali) dan mengamankan akses ke sarana reproduksi sosial.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Gahman (2020), yang menggambarkan bagaimana gerakan sosial-politik yang dilakukan oleh kelompok Zapatista telah mendorong lahirnya dekolonisasi, demokrasi, dan gerakan sosial yang bersama-sama menciptakan politik emansipatoris. Dari penelitian ini, dipahami bahwa perlawanan anti-kapitalis telah mendorong massa kritis pluralistik dapat mengilhami realitas sehari-hari di mana orang hidup dan bekerja dengan makna dan tujuan.

Merujuk juga pada hasil penelitian oleh Hoogesteger & Verzijl (2015) tentang perjuangan petani dan masyarakat adat untuk akses air di Peru dan Ekuador. Adapun temuan dalam penelitian ini menggambarkan bagaimana mempertahankan kepentingan akar rumput sangat bergantung pada kapasitas kelompok-kelompok tersebut untuk terlibat dalam politik skalar akar rumput. Dengan meningkatnya tekanan petani pedesaan dan masyarakat adat, kesadaran berkembang bahwa akses

mereka ke air dan kepentingan terkait tertanam dalam politik regional dan nasional yang lebih luas, dimana kerangka hukum dan kebijakan air telah menyebabkan banyak komunitas dan asosiasi pengguna air petani untuk terlibat dalam jaringan dan membuat aliansi dengan pengguna air lainnya, lembaga pemerintah dan aktor non-pemerintah.

Sedangkan itu, Drahmoune (2013) telah mengidentifikasi perspektif dan pendekatan terhadap tantangan analitis yang muncul dari sifat perubahan agraria yang multi-segi dan saling terkait pada gerakan agraria dan politik petani di Asia Tenggara. Adapun penelitian ini mengkritisi bahwa transisi agraria, perlawanan pedesaan dan politik petani di Asia Tenggara merupakan tanggapan terhadap perubahan pedesaan dipengaruhi oleh adanya agensi dan persepsi perlawanan petani sebagai saling berhubungan di berbagai skala dalam kondisi struktural yang lebih luas.

Di Indonesia, terdapat suatu organisasi petani yang memperjuangkan reforma agraria

yakni SPI (Serikat Petani Indonesia). SPI dalam gerakannya juga menerapkan pendekatan politik, baik dalam memperjuangkan keterlaksanaan reforma agraria sebagai kebijakan negara maupun sebagai strategi yang digunakan dalam menjalankan aksi *land reclaiming* yang dilakukan massa aksi di tingkat akar rumput. Hal ini dapat dilihat dari kanal website spi.or.id, bahwa SPI telah terlibat langsung dalam elektoral kepresidenan di Indonesia pada tahun 2014 dan 2019. Adapun yang ditekankan oleh SPI dalam keterlibatan elektoral tersebut ialah sebagai bagian dari kerja-kerja organisasi yang bertujuan untuk mendorong isu reforma agrarian dan kedaulatan pangan menjadi kebijakan pemerintah yang terpilih secara demokratis.

Berdasarkan permasalahan agrarian yang ada di Indonesia, serta adanya gerakan politik yang dilakukan oleh SPI dalam memperjuangkan reforma agraria, menjadi latar belakang yang dianggap penting dan menarik untuk menguraikan dan menganalisis

bagaimana pola gerakan politik agraria yang dijalankan oleh SPI.

METODE PENELITIAN

Untuk menguraikan dan menganalisis bagaimana bagaimana pola gerakan politik agraria yang dijalankan oleh SPI, tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode narrative research. Metode penelitian ini berfokus pada mempelajari satu atau dua individu, mengumpulkan data melalui kumpulan cerita mereka, melaporkan pengalaman individu, dan secara kronologis mengurutkan makna dari pengalaman tersebut (Creswell & Poth, 2018).

Penelitian ini berlangsung dari Juli 2021 hingga November 2021, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan *in-depth interview*. Adapun dalam penentuan informan wawancara, penelitian ini menggunakan teknik *purposive* dengan pengategorian informan berdasarkan informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, informan penelitian didasarkan pada tingkatan kepengurusan SPI: tingkat basis di

sektor desa; tingkat wilayah di sektor provinsi, serta tingkatan pusat yang mengurus sektor nasional dan internasional. Selain itu, teknik analisis data dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan Narrative Research Analysis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan penelitian, penulis menggolongkan pola gerakan politik yang dijalankan oleh SPI diklasifikasikan dalam tingkatan lokal, nasional, hingga internasional. Walaupun uraian tulisan ini didasarkan pada tiga tingkatan tersebut, tapi masing-masing tingkatan pada dasarnya memiliki keterkaitan sebagai suatu pola yang dianggap perlu untuk saling bersinegi. Selain itu, uraian ini juga didasarkan pada model yang dikembangkan oleh Gaventa (2019) dalam melihat relasi kuasa dalam konflik sumber daya alam dalam bentuk-bentuk kekuasaan yang *visible, hidden, and invisible* dimainkan dengan bervariasi menurut ruang (*closed, invited, and claimed*) dan tingkatan aksi (dari lokal hingga global).

a. Gerakan Politik Agraria oleh SPI dibangun dari Tingkat Lokal

Berdasarkan temuan penelitian, diketahui bahwa sebelum SPI terbentuk dan memiliki isu serta konsep tentang reforma agraria, para aktivis yang mendorong lahirnya SPI (aktivis Yayasan Sintesa) masih berfokus pada pengorganisasian dan pendampingan petani di tingkatan akar rumput dalam menghadapi konflik agraria. Lalu setelah perkembangan pola gerakan yang dilakukan, dari berbagai kelompok petani yang menghadapi konflik agraria tersebut didorong untuk mendirikan SPI dan menjadikan reforma agraria menjadi isu perjuangan. Adapun proses ini dapat dipahami dalam konsep *grassroots scalar politics* (Hoogesteger & Verzijl, 2015) dimana untuk membangun kekuatan pada komunitas akar rumput dalam gerakan sosialnya membutuhkan upaya penciptaan kesatuan kolektif internal di mana orang dan sumber daya dimobilisasi, dan yang menjadi dasar untuk pengembangan kolaborasi, jaringan

dan federasi supra-komunitas akar rumput.

Diketahui juga bahwa dari berbagai strategi yang digunakan dalam perebutan lahan oleh para petani anggota SPI (Sinaga, 2022), salah satu strategi yang digunakan adalah peningkatan kekuatan politik petani di tingkat Desa. Adapun yang dimaksud dengan peningkatan kekuatan politik petani ini ialah melalui pengambilan jabatan publik yang memiliki kekuatan politik, seperti jabatan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, hiangga anggota legislatif di tingkat Kabupaten. Dalam usahanya menjalankan gerakan agraria di lokasi-lokasi konflik tanah, anggota SPI kerap berupaya mengambil pengaruh politik, baik dengan menjadikan anggotanya sebagai Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa maupun menjalin kontrak politik dengan salah satu calon Kepala Desa di luar anggota yang dianggap berpotensi terpilih dan memiliki keberpihakan pada perjuangan agraria anggota SPI. Jika ditelusuri lagi, upaya para petani anggota SPI menjalankan

Gerakan politik di tingkatan Desa ini merupakan buah dari hasil pendidikan anggota yang dijalankan oleh SPI sebelum menjalankan aksi-aksi perjuangannya.

Walaupun diakui bahwa kemampuan membaca peluang-peluang politik bagi beberapa anggota SPI bukan hal yang baru (sebelum menjadi anggota SPI). Hal ini sudah menjadi hal yang wajar ditengah transformasi pedesaan saat ini yang lebih mendekatkan para masyarakat pedesaan pada perilaku politik masing-masing. Sebagaimana dijelaskan oleh Tria Kerkvliet (2009), bahwa politik dalam masyarakat petani sebagian besar adalah jenis kehidupan sehari-hari. Walaupun begitu, perlu diakui bahwa membuat gerakan politik yang terorganisir bukan hal yang mudah untuk dilakukan jika tidak dalam wadah organisasi dan mendapatkan pendidikan-pendidikan organisasi.

Selain menyelenggarakan pendidikan di tingkat dasar untuk membangun kesadaran kritis dan melahirkan kader-kader tani yang memiliki keterampilan kepemimpinan dan keahlian praktis dalam melakukan gerakan sosial, serta merebut

kekuasaan di tingkat desa untuk memperkuat perjuangan di tingkat lokal, para petani SPI juga memantapkan praktik-praktik alternatif yang berkelanjutan sebagai bentuk perlawanan terhadap hegemoni kekuasaan yang dominan, Sperti melakukan aksi massa sebagai reaksi atas tekanan yang dihadapi dan desakan tuntutan untuk mempengaruhi kebijakan. Berdasarkan strategi-strategi yang dijalankan oleh anggota SPI dalam mengambil pengaruh politik di tingkatan Desa menggambarkan bagaimana hubungan politik petani 'tradisional' dengan kelompok dan lembaga di luar komunitas lokal mereka. Sebagaimana dijelaskan oleh Hobsbawm (1973), bahwa isolasi relatif dari komunitas lokal, dan ketidaktahuan mereka, tidak membatasi politik petani hanya pada *parish pump* yang tidak terdefinisi. Maka adanya subalternitas umum dunia petani yang menekankan pemisahan identitas petani, menjadikan suatu konfrontasi eksplisit kekuasaan sebagai kerangka politik mereka. Hal ini juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Gahman

(2020) bawah perlawanan anti-kapitalis dan semangat gotong royong dapat menggembeleng massa kritis yang pluralistik, memberdayakan komunitas, menghidupkan jalan keluar dari kekerasan struktural, mengubah dunia, dan, pada akhirnya, mengilhami realitas sehari-hari di mana orang hidup dan bekerja dengan maksud dan tujuan.

Akan tetapi dari beberapa gerakan politik yang dijalankan SPI tingkatan Desa tidak serta merta berhasil di semua lokasi. Diakui bahwa kekalahan-kekalahan yang dihadapi oleh anggota SPI dalam pemilihan Kepala Desa dikarenakan kekuatan 'politik uang' yang dimiliki pihak lawan. Hal ini pula yang disorot oleh Scoones dkk (2021) bahwa di tengah munculnya bentuk-bentuk populisme otoriter (meskipun ada perbedaan yang signifikan dalam bagaimana hal ini dibentuk di tempat yang berbeda) yang juga berdampak pada terjadinya transformasi pedesaan. Sebagaimana di Indonesia adanya Alokasi Dana Desa telah menjadikan perebutan kekuasaan tingkat Desa menjadi lebih terpola.

b. Gerakan Politik Agraria oleh SPI di tingkat Nasional

Perjuangan politik agrarian oleh SPI di tingkat nasional dilakukan untuk mendesak reforma agraria sebagai agenda politik utama secara nasional. Dalam pandangannya, SPI meyakini bahwa akar kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh ketidakadilan dalam hal penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam. Maka perjuangan strategis SPI diarahkan untuk membangun tahapan-tahapan perjuangan agraria yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Dimana perumusan strategi perjuangan politik dan perjuangan strategis tersebut, berangkat dari analisis mendalam terhadap sistem ekonomi-politik nasional yang mengakibatkan ketimpangan agraria.

Dalam dokumen Pandangan Dasar SPI tentang Pembaruan Agraria Dan Pembangunan Pedesaan, terdapat empat faktor penyebab terjadinya ketidakadilan dalam hal penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber agraria. Pertama, adanya ketimpangan struktur penguasaan sumber-sumber agraria sebagai warisan zaman feodal

dan kolonial. Kedua, tanah hanya dijadikan sebagai alat investasi belaka (komoditisasi) yang mengebiri nilai filosofis tanah. Ketiga, kesalahan paradigma pembangunan. Dan keempat, intervensi pemodal melalui organisasi internasional. Hal ini menggambarkan bagaimana pandangan SPI terhadap bentuk-bentuk relasi kekuasaan yang dihadapi dalam perjuangan agraria.

Berangkat dari strategi perjuangan politik yang didasari pandangan dasarnya, SPI telah menjalankan beberapa agenda politik organisasi. Adapun beberapa diantaranya yang dirangkum oleh penulis ialah sebagai berikut:

- Membangun jaringan gerakan sosial di tingkat nasional, baik pada sesama organisasi dan kelembagaan petani, maupun organisasi dan kelembagaan di luar komunitas petani seperti buruh, nelayan, dan solidaritas perempuan.
- Membangun jaringan politik dengan birokrat dan kader-kader partai politik yang dianggap

memiliki pandangan kritis mengenai permasalahan agraria.

- Melakukan kampanye-kampanye politik tentang reforma agraria, termasuk kampanye pelemahan pihak lawan dalam konflik agraria yang dihadapi oleh anggota SPI.
- Ikut serta dalam mendukung salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu di tahun 2014 dan di tahun 2019. Menariknya dalam hal ini adalah ketika usulan SPI sebagai kontrak politik telah menjadikan reforma agraria sebagai bagian salah satu Program Kerja Pemerintah (disebut dengan Nawa Cita) di tahun 2014.
- Terbaru, SPI ikut serta dengan organisasi-organisasi gerakan sosial lainnya dalam membentuk partai politik, yakni Partai Buruh.

Hal yang menarik dalam hal ini ialah adanya pola hubungan yang terkadang terlihat paradoks namun perlu dipahami bagaimana ideologi gerakan dibangun. Dimana SPI sebagai organisasi gerakan petani terkadang menempatkan negara

sebagai lawan karena adanya oligarki kekuasaan yang menempatkan kepentingan kapitalisme dalam kuasa negara, namun di satu sisi SPI menempatkan negara sebagai kekuatan yang dapat menghempang kekuatan pasar kapitalisme, termasuk upaya pelaksanaan reforma agraria. Untuk memahaminya, penulis menggunakan istilah dari Calleros-Rodríguez (2014) yang melihat adanya *micro-corporatism* dengan negara sebagai proses politik oleh gerakan rakyat.

Walaupun dapat dipahami bahwa upaya-upaya SPI dalam memasukkan agenda reforma agraria dalam wacana populis yang digunakan pemerintah sebagai suatu program prioritas, tidak dapat berjalan dengan mudah. Hal ini dapat terlihat dari bagaimana adanya dekonstruksi pemaknaan reforma agraria di pemerintahan selama terjadinya tarik ulur kepentingan antara pemerintah dengan kepentingan kapitalisme. Tapi juga perlu dipahami bagaimana perilaku elektoral dalam politik kepresidenan semacam itu mungkin menyamarkan, atau setidaknya tidak

mencerminkan, pola pengorganisasian dan perlawanan subaltern. Dimana Gaventa (2019) melihat ini sebagai perbedaan antara bentuk politik nasional berbasis wacana dan politik lokal berbasis tempat yang lebih radikal dan berpotensi transformatif, yang mungkin duduk berdampingan dengan tidak nyaman. Namun, terlepas dari penerimaan retorik yang meluas, juga menjadi jelas bahwa hanya dengan membuat pengaturan kelembagaan baru tidak akan selalu menghasilkan inklusi yang lebih besar atau perubahan kebijakan yang berpihak pada masyarakat miskin. Sebaliknya, banyak yang bergantung pada sifat hubungan kekuasaan yang mengelilingi dan mengilhami ruang-ruang baru yang berpotensi lebih demokratis.

Kesulitan yang dihadapi ini pada akhirnya memberikan kesadaran baru bahwa gerakan sosial tidak dapat hanya bergantung pada hubungan kekuasaan di luar kekuatan massa itu sendiri. Bahkan Ketika hubungan kekuasaan itu dilandaskan pada corak ideologi yang diwacanakan suatu partai politik. Sebagaimana apa yang

terjadi pada gerakan politik petani di Amerika Latin dari hasil penelitian Vergara-Camus & Kay (2017), yang menggambarkan tentang situasi ekonomi dan politik pedesaan Amerika Latin ketika gelombang partai dan pemimpin sayap kiri mengambil alih kekuasaan di beberapa negara, akan tetapi hanya sedikit janji untuk mereformasi sektor agraria yang berpihak pada petani dan produsen keluarga yang dipenuhi. Situasi ini merupakan sebuah paradoks, karena pemerintah-pemerintah ini berkuasa sebagian di belakang gelombang mobilisasi sosial di mana gerakan petani dan pribumi telah menjadi aktor kunci. Namun, gerakan sosial pedesaan tidak mampu menekan negara untuk mengubah situasi ini. Inti dari paradoks ini terletak pada kontradiksi, yaitu bahwa dalam proposal politik mereka gerakan sosial pedesaan menyerukan negara intervensionis, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengontrolnya melalui aliansi mereka dengan partai politik dan politisi.

Berdasarkan situasi yang kompleks ini, dan juga melihat perbandingan di berbagai gerakan

petani di belahan dunia lainnya, telah turut serta mendorong SPI untuk bergabung dengan elemen gerakan sosial lainnya untuk membentuk partai politik sendiri. Karena bentuk-bentuk tertentu dari aksi petani secara nasional tanpa kepemimpinan dan organisasi dari luar menjadi sulit. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Della Porta dan Tarrow (2005), bahwa resistensi terhadap perubahan agraria kini menghubungkan para aktor di berbagai skala spasial yang lebih luas daripada sebelumnya, dan para aktivis harus belajar beroperasi dalam struktur peluang berlapis-lapis.

c. Gerakan Politik Agraria oleh SPI di tingkat Internasional

Serikat Petani Indonesia berpandangan bahwa perjuangan agraria oleh petani tidak cukup hanya pada tingkat lokal dan nasional saja. Permasalahan yang dihadapi petani tidak lepas dari pengaruh kekuatan internasional dari kolonialisme-imperialisme dalam bentuk baru. Jebakan dari isu-isu kemanusiaan untuk memerangi kelaparan, menurunkan angka kemiskinan, mendorong negara

berkembang untuk mengambil kebijakan yang lebih terbuka terhadap investasi.

SPI menganggap bahwa argumentasi tentang kepentingan investasi ke negara miskin dan berkembang hanya akan melahirkan penindasan-penindasan baru. Contoh yang diberikan adalah konflik tanah yang dihadapi anggota SPI di Desa Mekar Jaya, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Di tengah petani telah berhasil menduduki lahan selama kurun waktu satu setengah dekade setelah berhadapan dengan PTPN II, akhirnya harus tergusur kembali karena kehadiran kekuatan modal dari perusahaan internasional yang mendapat izin pengelolaan (kerjasama). Oleh karena itu, SPI sejak dari awal berdiri sudah memutuskan untuk terlibat dalam berbagai *multi-national movement*.

Seperti diketahui bahwa SPI merupakan anggota dari La Via Campesina (payung organisasi petani internasional), turut aktif dalam menjalankan isu-isu perjuangannya dalam skala internasional. Bahkan SPI juga merupakan penggagas awal pada

upaya mendorong lahirnya United Nations Declaration on the Rights of Peasant and Other People Working in Rural Areas (UNDROP).

Secara historis, terdapat perjuangan yang Panjang yang dilakukan SPI untuk instrument internasional mengenai Hak Asasi Petani tersebut. Gerakan ini muncul akibat hak-hak dasar petani seperti tanah, benih, air, dan lainnya yang tidak dilindungi oleh negara. Hal ini diangkat berdasarkan pengalaman pengorganisasian SPI di wilayah pantai timur Sumatera Utara. Lalu rangkaian tersebut dijadikan sebuah naskah Deklarasi Hak Asasi Petani yang dibawa pada Konferensi Nasional Pembaruan Agraria di Cibubur, Jawa Barat, tahun 2001. Adapun pasal-pasal yang dimuat dalam naskah ini diantaranya adalah: hak atas hidup; hak atas penguasaan dan pemakaian sumber daya alam; hak atas produksi; hak atas konsumsi; hak memasarkan produk; hak akan keberorganisasian; dan hak akan ekspresi atau pengungkapan (SPI, *Sejarah Langkah UNDROP*, 2020). Setelah penantian Panjang selama 17 tahun, PBB

mengesahkan Deklarasi Hak Asasi Petani pada 17 Desember 2018. UNDROP disahkan lewat hasil voting pada siding Majelis Umum PBB dengan hasil 121 negara mendukung, 8 negara menentang, dan 54 negara lainnya abstain.

Berdasarkan sejarah Panjang tersebut, dapat dipahami sebagai upaya dari transnasionalisasi gerakan petani (Borras, 2016), gerakan agraria harus memiliki implikasi yang luas tentang bagaimana gerakan agraria muncul, bagaimana karakter politik mereka berkembang, dan bentuk serta tingkatan pembangunan gerakan dan tindakan kolektif selanjutnya.

Sebagai upaya menghadapi permasalahan agraria, strategi pengorganisasian yang dilakukan oleh aktor-aktor massa akan memerlukan dukungan aliansi. Hal ini juga dijelaskan oleh Temper (2018), bahwa para aktivis telah berhasil menciptakan 'master frame' mobilisasi seputar perampasan tanah yang telah berkontribusi untuk mendorong kembali masalah tanah ke dalam agenda global, dan di mana berbagai kelompok yang berjuang melawan

perampasan telah mampu menyalurkan kekhawatiran melalui aliansi dalam jangka panjang.

Bahkan biasanya para aktivis transnasional ini terkadang menggunakan tekanan norma untuk mengarahkan pada aktor negara, perusahaan, dan keuangan tertentu. Sebagaimana dijelaskan oleh Bloomfield (2014), bahwa kampanye terkait perampasan tanah telah menargetkan perusahaan tertentu dan dana investasi melalui taktik seperti kampanye rasa malu berbasis pasar, yang bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku di perusahaan melalui penggunaan tekanan ekonomi dan sosial yang mengancam kerusakan nilai merek mereka, kehilangan pelanggan melalui boikot dan melemahnya kemampuan untuk meningkatkan modal. Dalam hal ini juga perlu adanya penekanan kontemporer pada akuntabilitas formal dan elektoral sebagai sarana untuk memicu tindakan publik, sebagaimana juga dijelaskan oleh Hossain & Kalita (2014) dalam melihat gerakan politik pangan, bahwa ekspresi konkret dari ekonomi moral

ini terlokalisasi dan bergantung secara politis, namun ada area kesamaan yang luas di seluruh pengaturan.

SIMPULAN

SPI telah menjalankan aksi-aksi yang menjadi manifestasi dari pandangan politik yang didasarkan permasalahan yang dihadapi oleh petani itu sendiri. Gerakan politik yang dibangun SPI masuk dalam multi aspek, baik di tingkatan lokal, nasional, hingga internasional, yang masing-masing tingkatan memiliki keterkaitan sebagai suatu pola yang dianggap perlu untuk saling bersinegi. Adapun yang paling menarik dari hal ini ialah pola gerakan SPI yang mengutamakan kekuatan massa yang terpimpin dan terorganisir, sehingga dapat menjalankan berbagai Gerakan politik yang mengakar, baik dari segi pandangan hingga sikap dari Gerakan yang telah dijalankan.

Dari hal ini, dapat dipahami bahwa permasalahan agraria membutuhkan gerakan politik yang massif secara multi dimensi yang berorientasi pada kepentingan rakyat secara berkeadilan. Multi dimensi yang dimaksud dalam hal ini ialah

kemampuan untuk dapat menjalankan gerakan yang saling bersinergi dari seluruh lapisan struktur organisasi. Serta gerakan petani juga tidak dapat hanya terjebak pada aspek gerakan politik saja tanpa menyeimbangkan pada spek sosial, ekonomi dan budaya yang ada. Walaupun penulis melihat hal ini juga tetap berlangsung pada SPI, tapi potensi kehilangan keseimbangan dapat terjadi ditengah upaya-upaya transformasi yang dilakukan oleh SPI sebagai organisasi gerakan massa petani.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Sumatera yang telah mendanai kegiatan penelitian. NON-PNBP Universitas Sumatera Utara membebaskan kegiatan penelitian ini berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian Dosen Muda Tahun Anggaran 2021. Selain itu, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Pusat Kajian Hak Asasi Petani (PUSKAHAP) FISIP USU yang membantu penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bloomfield, M.J. 2014. Shame campaigns and environmental justice: Corporate shaming as activist strategy. *Environmental Politics* 23, no. 2: 263–81.
- Borras, J. 2016. Land politics, agrarian movements and scholar-activism. Inaugural Lecture, International Institute of Social Studies (ISS), The Hague. April 14.
- Borras, S.M., and J.C. Franco. 2013. Global land grabbing and political reactions ‘from below’. *Third World Quarterly* 34, no. 9: 1723–47.
- Creswell, John W. & Poth, Cheryl N. 2018. *Qualitative inquiry and research design: choosing among five approaches* (Fourth Edition). London: SAGE Publications.
- Della Porta, D., and S.G. Tarrow. 2005. *Transnational protest and global activism*. Lanham: Rowman & Littlefield.
- Drahmoune, F. (2013). Agrarian transitions, rural resistance and peasant politics in Southeast Asia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 32(1), 111-139.
- Fauzi, Noer. 1999. *Petani dan penguasa: dinamika perjalanan politik agraria Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Gahman, L. (2020). Contra plantation, prison, and capitalist annihilation: collective struggle, social reproduction, and the co-creation of lifegiving worlds. *The Journal of Peasant Studies*, 47(3), 503-524.
- Gaventa, J. (2019). Power and powerlessness in an Appalachian Valley-revisited. *Critical Agrarian Studies*, 80.
- Gaventa, J. (2021). Linking the prepositions: using power analysis to inform strategies for social action. *Journal of Political Power* 14(1), 109–130.
- Hall, R., M. Edelman, S.M. Borras Jr, I. Scoones, B. White, and W. Wolford. 2015. Resistance, acquiescence or incorporation? An introduction to land grabbing and political reactions ‘from below’. *The Journal of Peasant Studies* 42, no. 3-4: 467– 88.
- Hobsbawm, E. J. (1973). Peasants and politics. *The Journal of Peasant Studies*, 1(1), 3-22.
- Hoogesteger, J., & Verzijl, A. (2015). Grassroots scalar politics: Insights from peasant water struggles in the Ecuadorian and Peruvian Andes. *Geoforum*, 62, 13-23.
- Hossain, N., & Kalita, D. (2014). Moral economy in a global era: the politics of provisions during contemporary food price spikes. *The Journal of Peasant Studies*, 41(5), 815-831.
- Ito, T. (2011). Historicizing the power of civil society: a perspective from decentralization in Indonesia. *The*

journal of peasant studies, 38(2), 413-433.

Journal of Peasants' Right's, Vol. 1 No. 1: 20-29

- Martiniello, G. (2015). Social struggles in Uganda's Acholiland: understanding responses and resistance to Amuru sugar works. *Journal of Peasant Studies*, 42(3-4), 653-669.
- Mondros, Jacqueline. 2013. "Political, social, legislative action" in Weil Marie [Politik, sosial, tindakan legislatif" dalam Weil Marie] (ed) *The handbook of community practice*, (Second Edition) Los Angeles: Sage Publications, Inc.
- Neuman, W. Lawrence. 2014. *Social research methods: qualitative dan quantitative approaches* (Seventh Edition). London: Pearson Education Ltd.
- Rohmad, Abu. (2008). *Paradigma resolusi konflik agraria*. Semarang: Walisongo Press.
- Scoones, I., Edelman, M., Borras Jr, S. M., Forero, L. F., Hall, R., Wolford, W., & White, B. (Eds.). (2021). *Authoritarian Populism and the Rural World*. Routledge.
- Sinaga, Randa Putra Kasea and Adi, Isbandi Rukminto. 2020. Kondisi ekonomi petani dalam konflik agraria (Studi pada anggota Serikat Petani Indonesia). *Jurnal Pembangunan Manusia* 1, no. 2, Art 4: 151-165.
- Sinaga, Randa Putra Kasea. 2022. *Peasants' Social Action Strategies In Agrarian Conflict (Study Of The Indonesian Peasants' Union*.
- Temper, L. 2019. From Boomerangs to Minefields and Catapults: Dynamics of Trans-local Resistance to Land-grabs. *Journal of Peasant Studies* 46, no. 1: 188-216.
- Tria Kerkvliet, B. J. (2009). Everyday politics in peasant societies (and ours). *The journal of peasant studies*, 36(1), 227-243.
- Vergara-Camus, L., & Kay, C. (2017). Agribusiness, peasants, left-wing governments, and the state in Latin America: An overview and theoretical reflections. *Journal of Agrarian Change*, 17(2), 239-257.